

**EVALUASI PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM  
PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA**



**OLEH:**

**VANESHA GLORYA PRISKILLA**

**126231008**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANEGARA  
JAKARTA  
2024**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**EVALUASI PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM  
PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA**



OLEH:

**VANESHA GLORYA PRISKILLA**

**126231008**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANEGARA  
JAKARTA**

**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**EVALUASI PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM**  
**PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA**  
**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA**

**Laporan Tugas Akhir**

**Disusun Oleh:**



**Vanesha Glorya Priskilla**

**126231008**

**Disetujui Oleh:**



**SUSANTO SE.,M.M.,Ak.,CPA, CPMA,CA,ACPA**

**EVALUASI PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM  
PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA**

**Vanesha Glorya Priskilla**

Profesi Akuntansi  
Universitas Tarumanegara  
Jl. Letjen S. Parman No. 1, DKI Jakarta  
Email : [vanesha.126231008@stu.untar.ac.id](mailto:vanesha.126231008@stu.untar.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam proses pengendalian internal Pemerintah Provinsi Papua dalam pembuatan laporan keuangan, khususnya terkait piutang tak tertagih pada pajak kendaraan bermotor yang sering terjadi setiap tahun. Piutang tak tertagih ini menghambat penerimaan pendapatan daerah yang seharusnya dapat meningkatkan pendapatan bagi Pemerintah Provinsi Papua. Penelitian dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner terstruktur kepada pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tujuh bentuk pengendalian internal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam penatausahaan pajak kendaraan bermotor, yaitu otorisasi dan persetujuan, pemantauan dan verifikasi, pemisahan tugas, rekonsiliasi, pengamanan aset, penelaahan kinerja, dan kontrol IT. Bentuk pengendalian internal yang paling kuat adalah yang bersifat teknis atau prosedural seperti rekonsiliasi, pengamanan aset, dan pemisahan tugas. Sebaliknya, bentuk pengendalian internal yang paling lemah berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, seperti kontrol IT, penelaahan kinerja, pemantauan, dan verifikasi. Rekomendasi perbaikan untuk pengendalian internal yang paling lemah adalah dengan memprioritaskan pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan, edukasi, proses rekrutmen, dan evaluasi kinerja.

Kata Kunci : Pemerintah Papua, Pajak Kendaraan Bermotor, Laporan Keuangan, Pengendalian Internal

## **ABSTRACT**

*This research aims to identify weaknesses in the Papua Provincial Government's internal control process in preparing financial reports, especially regarding bad debts on motor vehicle taxes which often occur every year. These bad debts hinder regional revenue receipts which should be able to increase revenue for the Papua Provincial Government. The research was conducted using quantitative descriptive analysis methods with data collection through distributing structured questionnaires to employees. The results of the research show that there are seven forms of internal control that have been carried out by the Papua Provincial Government in administering motor vehicle taxes, namely authorization and approval, monitoring and verification, separation of duties. , reconciliation, asset security, performance review, and IT controls. The strongest form of internal control is technical or procedural in nature, such as reconciliation, asset security, and segregation of duties. On the other hand, the weakest form of internal control is related to the quality of human resources, such as IT control, performance review, monitoring and verification. Recommendations for improvement for the weakest internal control are prioritizing the development of the quality of human resources through training, education and process activities. recruitment, and performance evaluation*

*Keywords: Papuan Government, Motor Vehicle Tax, Financial Reports, Internal Control*

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur saya ucapkan atas kehadiran Tuhan karena berkat rahmatNya peneliti dapat menyelesaikan Karya Akhir yang berjudul “Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dalam Penatausahaan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua” sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Selama penyusunan Karya Akhir ini, peneliti menyadari bahwa banyak bantuan berupa kritik dan saran dari berbagai pihak yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti bersyukur dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Karya Akhir ini dapat terselesaikan tepat waktu;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., I.P.U., ASEAN Eng selaku Rektor Universitas Tarumanegara;
3. Bapak Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., M.B.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanegara;
4. Bapak Dr. Jamaludin Iskak, M.Si., Ak., CACP., CPI., CA., CPA. selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanegara;
5. Bapak Susanto SE.,M.M.,Ak.,CPA, CPMA,CA,ACPA selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini ;
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanegara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta membatu selama proses perkuliahan; dan
7. Seluruh keluarga, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Peneliti menyadari dalam penulisan tugas akhir ini masih ada kekurangan dan keterbatasan didalamnya, sehingga kritik dan saran akan sangat membantu dalam perbaikan tugas akhir ini.

Jayapura, 07 Juli 2024  
Penulis

Vanessa Glorya Priskilla

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN COVER.....                         | i   |
| LEMBAR PENGESAHAN.....                     | iii |
| ABSTRAK.....                               | iv  |
| KATA PENGANTAR.....                        | vi  |
| DAFTAR ISI.....                            | vii |
| DAFTAR GAMBAR.....                         | ix  |
| DAFTAR TABEL.....                          | x   |
| 1.2. Rumusan Masalah.....                  | 3   |
| 1.3. Batasan Masalah.....                  | 3   |
| 1.4. Tujuan Penelitian.....                | 4   |
| 1.5. Manfaat Penelitian.....               | 4   |
| 1.6. Sistematika Penulisan.....            | 5   |
| BAB II.....                                | 6   |
| TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....   | 6   |
| 2.1. Tinjauan Pustaka.....                 | 6   |
| 2.2. Landasan Teori.....                   | 11  |
| 2.2.1. Pajak di Indonesia.....             | 12  |
| 2.2.2. Pajak Kendaraan Bermotor.....       | 13  |
| 2.2.3. Pengendalian Internal.....          | 13  |
| 2.2.4. Kegiatan Pengendalian Internal..... | 14  |
| BAB III.....                               | 17  |
| METODE PENELITIAN.....                     | 17  |
| 3.1. Metode Penelitian.....                | 17  |
| 3.1.1. Metode Pengumpulan Data.....        | 17  |
| 3.1.2. Analisis Deskriptif.....            | 18  |
| 3.1.3. Uji Validitas dan Reliabilitas..... | 18  |
| BAB IV.....                                | 21  |
| HASIL DAN PEMBAHASAN.....                  | 21  |

|                            |  |    |
|----------------------------|--|----|
| 4.1.                       | Profil Lama Bekerja Responden.....   | 21 |
| 4.3.                       | Bentuk Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi Papua dalam Penatausahaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Pembuatan Laporan Keuangan..... | 26 |
| 4.4.                       | Bentuk Pengendalian Internal dari yang Terkuat hingga Terlemah .....   | 29 |
| 4.5.                       | Rekomendasi Perbaikan Bentuk Pengendalian Internal yang Lemah.....   | 30 |
| BAB V.....                 |  | 31 |
| KESIMPULAN DAN SARAN ..... |  | 31 |
| 5.1.                       | Kesimpulan.....  | 31 |
| 5.2.                       | Saran .....  | 31 |
| DAFTAR PUSTAKA .....       |  | 32 |
| LAMPIRAN .....             |  | 34 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1.1 Pertumbuhan Kendaraan Bermotor di Indonesia 2012-2022 ..... | 2  |
| Gambar 4.1 Perbandingan Pegawai Baru dan Pegawai Lama .....            | 21 |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak Nasional 2022-2024 .....                              | 1  |
| Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu .....   | 8  |
| Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas .....   | 19 |
| Tabel 3.2. Hasil Uji Reliabilitas .....   | 20 |
| Tabel 4.3 Data Deskriptif .....   | 22 |
| Tabel 4.4 Penilaian Bentuk Pengendalian Internal Otorisasi dan Persetujuan .....      | 23 |
| Tabel 4.5 Penilaian Bentuk Pengendalian Pemantauan dan Verifikasi .....               | 23 |
| Tabel 4.6 Penilaian Bentuk Pengendalian Pemisahan Tugas .....                         | 24 |
| Tabel 4.7 Penilaian Bentuk Pengendalian Internal Rekonsiliasi .....                   | 24 |
| Tabel 4.8 Penilaian Bentuk Pengendalian Internal Pengamanan Aset .....                | 24 |
| Tabel 4.9 Penilaian Bentuk Pengendalian Internal Penelaahan Kinerja .....             | 25 |
| Tabel 4.10 Penilaian Bentuk Pengendalian Internal Kontrol IT .....                    | 25 |
| Tabel 4.11 Peringkat Bentuk Kegiatan Pengendalian Internal dari Nilai Tertinggi ..... | 26 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pajak adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah terhadap pendapatan, kekayaan, atau transaksi ekonomi lainnya. Tujuan utama pajak adalah untuk mendapatkan pendapatan bagi pemerintah guna membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan (Ariffin *et.al.*, 2022). Pajak kemudian digunakan oleh negara untuk kepentingan pembangunan yang tentunya ditujukan Kembali kepada masyarakat Indonesia. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar negara. Berdasarkan pada undang-undang tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pajak merupakan kewajiban masyarakat kepada negara baik dalam bentuk personal ataupun badan yang memiliki sifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan demi kemakmuran masyarakat. Hingga saat ini pajak memiliki kontribusi sebesar 73% terhadap APBN Indonesia dimana terdapat dua jenis pajak terbesar yaitu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak Nasional 2022-2024 (Sumber: bps.go.id)

| Dalam Milyar Rupiah |              |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Keterangan          | 2022         | 2023         | 2024         |
| Penerimaan Pajak    | Rp 2.635.843 | Rp 2.637.248 | Rp 2.802.293 |

Berdasarkan pada tabel 1.1 diketahui bahwa selama tiga tahun terakhir nilai pajak terus bertambah setiap tahunnya, maka dapat dikatakan bahwa kontribusi pajak tersebut terhadap APBN negara juga semakin meningkat setiap tahunnya sehingga pajak menjadi hal yang sangat penting bagi negara.

Kendaraan bermotor menjadi komoditas yang hampir dibutuhkan oleh setiap masyarakat Indonesia, hal tersebut karena kendaraan bermotor mampu mempermudah proses transportasi seseorang. Hal tersebut dibuktikan dengan

peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang semakin besar pada tahun 2012-2022.



Gambar 1.1 Pertumbuhan Kendaraan Bermotor di Indonesia 2012-2022 (Sumber: Databoks.Katadata.co.id)

Berdasarkan pada gambar 1.1 maka dapat dikatakan bahwa kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor semakin meningkat sehingga hal tersebut memberikan dampak pada peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor sendiri telah memberikan andil sebesar 47,39% dari total pendapatan asli daerah secara nasional, maka dapat dikatakan bahwa kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam pemberian pendapatan pajak nasional (Kemendagri, 2022). Karena memiliki posisi yang cukup penting, maka dalam proses pelaksanaan pengelolaan data-data pajak kendaraan bermotor harus mendapatkan perhatian yang baik.

Proses pengelolaan data pajak kendaraan bermotor harus memiliki pengendalian internal yang baik guna memberikan hasil yang optimal. Hal tersebut tentunya juga telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Namun meski demikian masih terdapat beberapa kelemahan yang terjadi pada proses pengendalian internal Pemerintah Provinsi Papua pada pembuatan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua. Persoalan yang kerap terjadi adalah hamper setiap tahun terdapat piutang yang tak tertagih dengan nilai yang cukup tinggi

khususnya pada pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut tentunya menghambat penerimaan pendapatan daerah karena seharusnya piutang tak tertagih tersebut bisa memberikan pendapatan lebih bagi pemerintah provinsi Papua. Berdasarkan pada persoalan tersebut maka dilakukanlah sebuah penelitian untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pengendalian internal yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi Papua dan melalui bentuk-bentuk pengendalian internal tersebut kemudian dilakukan evaluasi untuk mengetahui bentuk pengendalian yang paling kuat dan yang paling lemah terhadap pelaksanaan proses piutang.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian yang dilakukan adalah :

1. Bagaimana bentuk pengendalian internal dalam penatausahaan pajak kendaraan bermotor dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah provinsi Papua ?
2. Bagaimana bentuk pengendalian internal dalam penatausahaan pajak kendaraan bermotor dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah provinsi Papua dari yang terlemah hingga yang paling kuat ?
3. Bagaimana rekomendasi perbaikan pada bentuk pengendalian internal paling lemah ?

## **1.3. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah yang ditentukan dalam penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Subjek penelitian adalah Pemerintah Provinsi Papua
2. Data yang digunakan hanya sebatas pada pajak kendaraan bermotor provinsi Papua.
3. Pembahasan penelitian hanya terbatas pada konteks pengendalian internal pajak kendaraan bermotor.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukannya penelitian adalah :

1. Identifikasi dan Menganalisis bentuk pengendalian internal dalam penatausahaan pajak kendaraan bermotor dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah provinsi Papua.
2. Identifikasi dan Menganalisis bentuk pengendalian internal dalam penatausahaan pajak kendaraan bermotor dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah provinsi Papua dari yang terlemah hingga yang paling kuat

Menganalisis rekomendasi perbaikan pada bentuk pengendalian internal paling lemah

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Papua  
Bisa memberikan rekomendasi perbaikan pada bentuk pengendalian internal yang kurang baik.
2. Bagi Masyarakat Papua  
Bisa menjadi sumber wawasan khususnya tentang bentuk pengendalian internal yang dilakukan oleh Pemerintah Papua terhadap laporan keuangan pajak kendaraan bermotor
3. Bagi Penulis  
Bisa memberikan pengalaman baru dalam melaksanakan suatu penelitian terkait dengan pengendalian internal Pemerintah Papua.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Penelitian yang telah dilakukan kemudian dituliskan kedalam laporan penelitian yang akan disajikan kedalam beberapa bab berikut :

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab yang pertama akan disajikan informasi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Batasan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

### **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

Pada bab yang kedua akan dijelaskan tentang beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya dan dijelaskan juga mengenai teori-teori yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian

### **3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab yang ketiga akan dijelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan meliputi dari metode pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data.

### **4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab yang keempat akan dituliskan hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan pada hasil pengolahan data yang sudah diperoleh. Selain itu diberikan juga analisis pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah diperoleh.

### **5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab yang kelima dijelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan disertai dengan saran untuk pelaksanaan penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiat, A. (2023, Maret 16). *Ini Pertumbuhan Jumlah Motor di Indonesia 10 Tahun Terakhir*. Retrieved from [databoks.katadata.co.id: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/16/ini-pertumbuhan-jumlah-motor-di-indonesia-10-tahun-terakhir](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/16/ini-pertumbuhan-jumlah-motor-di-indonesia-10-tahun-terakhir)
- Arrifin, M., & Sitabuana, T. (2022). Sistem Perpajakan di Indoneisa. *Seri Seminar Nasional ke IV Universitas Tarumanagara Tahun 2022* (pp. 523-533). Jakarta: SERINA IV UNTAR 2022.
- BPS. (2024, Januari 24). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) 2022-2024*. Retrieved from [bps.go.id: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html](https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html)
- Jurniarti, E. (2012). Evaluasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dispenda Bersama Samsat Kota Singkawang. *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, 43-66.
- Kemendagri. (2022, Juli 25). *Pajak Kendaraan Penyumbang Signifikan Pendapatan Daerah*. Retrieved from [koran.tempo.co: https://koran.tempo.co/read/info-tempo/475312/pajak-kendaraan-penyumbang-signifikan-pendapatan-daerah](https://koran.tempo.co/read/info-tempo/475312/pajak-kendaraan-penyumbang-signifikan-pendapatan-daerah)
- Laksana, G., Putra, I., Jayantara, P., & Badriyah, S. (2017). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dalam Penatausahaan Piutang Perpajakan Yang Berdampak Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 7(2), 102-109.
- Muhtarudin, & Apriani, A. (2023). Analisis Perhitungan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 di PPPD Kota Bandung III. *Perpajakan dan Keuangan Publik* 2(1), 12-21.
- Munifah. (2023). *Pengendalian Internal Sistem Informasi*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.

- Nurnaluri, S., Hasbuddin, & Ratu, W. (2019). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi dan Keunagan* 4(1), 379-400.
- Rajaguguk, T., Tinangon, J., & Wokas, H. (2019). Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnas Riset Akuntansi Going Concern* 14(1), 73-79.
- Sirait, T. H. (2020). *Evaluasi Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Atas Pembelian Bahan Baku Pada PT Alis Jaya Ciptatama*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* . Bandung: Alfabeta.